

**PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN TERHADAP KINERJA
APARAT PEMERINTAH DAERAH MELALUI KOMITMEN
ORGANISASI DAN *JOB-RELEVANT INFORMATION*
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)**

Oleh:

Dea Mayang Nabilah

Pembimbing : Vince Ratnawati dan Eka Hariyani

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : dea.nabilah44@gmail.com

*The Influence of Budgetary Participation on Managerial Participation through
Organizational Commitment and Job-Relevant Information as Intervening
Variable (Empirically Study on Bengkalis District Government)*

ABSTRACT

The objectives of this study were to prove empirically that organizational commitment job-relevant information might act as an intervening variable affecting the relationship between budgetary participation and managerial performance. Data for this study were collected by using 90 questionnaires, which were distributed to employee with 3rd and 4th grade echelon at 33 Government Offices in Bengkalis District. The sampling method used is purposive sampling. In total 68 questionnaires received were complete and hence usable in analysis. Using path analysis with SmartPLS 3.0 software, the result of this study indicates that the budgetary participation did not effects on managerial performance directly, but has indirectly positive and significant effects through job relevant information. Meanwhile, budgetary participation positively influence organizational commitment but did not influence managerial performance through organizational commitment as intervening variable.

Keywords: budgetary participation, commitment, job-relevant information, managerial, performance.

PENDAHULUAN

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas terwujudnya pemerintahan yang baik. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertang-

gungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban membuat laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja, sehingga dengan adanya laporan kinerja ini masyarakat dapat

mengetahui kinerja apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah (Setiadi, 2013).

Menurut Wahyudi (2005: 103), kinerja organisasi sektor publik adalah hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien sesuai dengan kehendak pengguna jasa informasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil dan serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kinerja manajer publik, yang selanjutnya dalam penelitian disebut dengan aparatur pemerintah daerah dinilai berdasarkan berapa target yang berhasil dicapai oleh aparatur tersebut dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan yang dapat dikur melalui aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013. Meskipun LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah dianggap cukup memuaskan, namun masih terdapat adanya temuan-temuan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah : 1. Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 terlambat disetorkan ke Kas Daerah ; 2. Penyajian Piutang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan SAP ; 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis tidak

memperoleh Potensi Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana Kas Daerah dan Dana Cadangan yang tidak sesuai dengan ketentuan; 4. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tertib; 5. Penerima Hibah Tahun Anggaran Tahun 2013 belum menyerahkan SPJ hibah sebesar dan sebagian tidak dapat diyakini kewajarannya; dan 6. Persiapan Pemerintah Daerah Bengkalis Menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua masih belum memadai. Selain itu, permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga masih banyak terdapat temuan-temuan.

Hal tersebut tentu saja masih belum cukup baik untuk memenuhi kepercayaan publik mengenai akuntabilitas instansi pemerintah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten setempat harus dapat menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran atas tanggungjawab yang telah diberikan kepada aparatur yang bersangkutan. Sehingga nantinya, Kabupaten Bengkalis memiliki akuntabilitas yang lebih baik lagi dan program-program yang telah disusun pada masing-masing instansi pemerintah dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setiap tahunnya. DPA ini tentunya dapat menjadi langkah awal sebagai alat kontrol kinerja instansi pemerintah.

Salah satu indikator tidak maksimalnya kinerja daerah kabupaten ini bisa dilihat dari serapan anggaran yang belum memuaskan. Dimana proyeksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) TA 2014 sebagaimana tercantum dalam

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 mencapai Rp. 885.808.033.708,83. Ini tentunya sangat menyedihkan bila kita lihat dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2006, yaitu sejak ditetapkannya Kepmendagri 13/2006 yang telah mengalami perubahan menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan mengalami perubahan kedua menjadi Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang mengacu pada PP 58/2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hingga sekarang pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang berupaya untuk dapat mengimplementasikan model struktur kekuasaan (otoritas) baru dan rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Ini merupakan keniscayaan, sebab dengan peraturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, yaitu penyusunan APBD yang berbasis pencapaian dimana penyusunannya harus dengan model anggaran partisipatif. Dari kaitan ini terlihat bahwa partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

Anthony dan Govindarajan (2011) menyatakan suatu proses penyusunan anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) atau dari bawah ke atas (*bottom-up*). Dengan penyusunan dari atas ke bawah, manajemen tingkat atas atau pemegang kuasa anggaran menetapkan anggaran bagi manajemen dengan tingkatan yang lebih rendah atau pelaksana anggaran. Sebaliknya, dengan penyusunan anggaran dari bawah ke atas atau dikenal dengan metode partisipatif, memungkinkan manajer dari tingkat yang lebih rendah atau pelaksana anggaran untuk berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran.

Model APBD berbasis kinerja yang penyusunannya menggunakan metode partisipatif ini menyebabkan struktur kekuasaan (otoritas) penyusunan APBD tidak hanya bergantung pada Kepala Daerah (model terdahulu tersentralisasi), bahkan harus didasarkan pada kekuasaan (otoritas terdesentralisasi) yang lebih bawah, yaitu pimpinan Badan, Dinas, Kantor, dan unit-unit lainnya (Syafuddin, 2006).

Anthony dan Govindarajan (2011) menyatakan bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yaitu proses di mana pembuat anggaran baik atasan maupun bawahan terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap manajerial, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja manajerial itu sendiri. Karena dengan adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran maka bawahan

merasa terlibat dan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran, sehingga bawahan diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik (Anthony dan Govindarajan, 2005:88). Jadi, dengan metode penganggaran yang partisipatif tentunya akan meningkatkan rasa tanggung jawab dari masing-masing SKPD untuk dapat mempertanggungjawabkan anggaran mereka sehingga daya serapan anggaran tiap tahunnya menjadi lebih tinggi.

Penelitian mengenai partisipasi penganggaran dan kinerja telah banyak dilakukan dengan menempatkan partisipasi penganggaran sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada awal-awal penelitian hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajer seringkali bertentangan dan tidak meyakinkan (*inconclusive*) (Nouri, 1992). Namun seiring perkembangan pola pikir dan kecanggihan teknologi, sejumlah penelitian mampu membuktikan hasil yang menunjukkan asosiasi negatif secara signifikan (Campbell dan Gingrich dalam Leach-Lopez, 2007), positif secara signifikan (Brownell dan McInes, 1986; Chenhall dan Brownell, 1988; Early dan Kanfer, 1985; Milani, 1975) negatif tidak signifikan (Mia, 1988), dan positif tidak signifikan (Latham dan Marshall, 1982).

Lebih jauh lagi, Brownell dan Hirst (1986) dalam Bambang (2007) terbukti menemukan hasil yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dalam penelitian yang telah mereka lakukan.

Penelitian mengenai hubungan antara proses penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial merupakan penelitian yang masih banyak diperdebatkan hasilnya sehingga penelitian-penelitian terdahulu menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja. Govindarajan (1986) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan kontijensi (*contingency approach*). Para peneliti mencoba untuk menguji pengaruh variabel *intervening* dan *moderating* yang mempengaruhi partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajer. Peneliti bermaksud menambahkan variabel kontijensi berupa : (1) komitmen organisasi dan (2) *Job-relevant information* (Informasi yang relevan dengan tugas) dalam penelitian kali ini.

Komitmen organisasi adalah keadaan individu yang memiliki kepercayaan, keterikatan, serta perasaan memiliki atas organisasi sehingga individu tersebut akan mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Manajer bawah yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan informasi-informasi yang akurat ke dalam usulan anggaran dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan atas usulan anggaran yang sudah disepakati bersama demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti dan Othman (2012), Eker (2007), menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan

komitmen organisasi. Manajer yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan memiliki perasaan bahwa dirinya memiliki andil dalam perusahaan tersebut sehingga dapat menyusun anggaran yang baik sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa mendatang dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Sedangkan Nurcahyani (2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berhasil menjadi variabel *intervening* dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

Selain komitmen organisasi, penelitian terdahulu juga telah banyak meneliti pengaruh *job-relevant information* dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. (Merchant 1981, Chow et al. 1988, serta Nouri dan Parker, 1998 dalam Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Rangga Bawono, 2006) menyatakan bahwa apabila bawahan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan informasi privat yang mereka miliki. Atasan menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan sehingga semakin mengurangi asimetri informasi dalam hubungan atasan dan bawahan. Bila bawahan diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevant dengan tugas (Yusfaningrum, 2005).

Sedangkan Hafridebri (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *job-relevant information* tidak

mempengaruhi hubungan partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial serta tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja manajerial.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah?; 2) Apakah komitmen organisasi dapat menjadi variabel *intervening* dalam hubungan partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah?; dan 3) Apakah *job-relevant information* dapat menjadi variabel *intervening* dalam hubungan partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah; 2) Untuk menguji komitmen organisasi sebagai variabel *intervening* dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah; dan 3) Untuk menguji *job-relevant information* sebagai variabel *intervening* dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

TELAAH PUSTAKA

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hehanusa (2010) menjelaskan bahwa para manajer yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran dapat mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai target yang diharapkan sehingga memunculkan keyakinan dalam diri manajer karena perasaan dihargai dan dipercaya.

Kinerja aparat pemerintahan dinilai dari bagaimana anggota-anggota dalam sektor pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Ven dalam Ferry (1980) menyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai unit kerja dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Instrumen kinerja terkait dengan pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program, akurasi (ketepatan dan kesesuaian) hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional, perilaku pegawai.

Partisipasi Anggaran

Vroom (1960) dalam Lestari. (2000) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran merupakan suatu proses kerjasama melalui dua atau lebih partisipan dalam pembuatan keputusan yang memiliki pengaruh terhadap masa yang akan datang terhadap apa yang telah diputuskan oleh mereka. Partisipasi melibatkan interaksi yang saling berhadapan antara individu-individu, atasan dan bawahan, untuk menetapkan anggaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Licata dkk., 1986; dalam Jacomina H., 2001).

Meskipun partisipasi dalam penganggaran memiliki berbagai keunggulan, namun masih terdapat permasalahan. Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa partisipasi

akan memungkinkan terjadinya *slack* anggaran. Untuk memudahkan pencapaian anggaran, mereka tidak akan memberikan seluruh informasi yang mereka miliki pada saat perancangan anggaran.

Komitmen Organisasi

Nouri (1994) dalam Handayani (2002) dalam penelitiannya mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat identifikasi pekerja dalam suatu organisasi. Manajer yang memiliki level *organisasional commitment* yang tinggi merasakan adanya sikap positif terhadap organisasinya. Mereka mengidentifikasi diri mereka terhadap organisasi tertentu, dan mencoba untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Porter dkk., 1976; dalam Handayani, 2002).

Menurut Meyer dkk. (1989) dalam Hariyanti (2001) bahwa komitmen organisasi afektif berhubungan positif dengan kinerja sedangkan komitmen organisasi normatif atau berkelanjutan berhubungan negatif. Bawahan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan akan berpikir positif untuk memihak pada organisasi, karena bawahan yang mempunyai komitmen yang tinggi pada organisasi menginginkan tujuan organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga memihak organisasi (Lowe dan Shaw, 1968; dalam Hariyanti, 2001).

Job-Relevant Information

Kren (1992) dalam penelitiannya tentang *job relevant information* (JRI) memahami sebagai informasi yang memfasilitasi

pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Krisler Bornadi Omposunggu dan Icut Ranga Bawono (2006) menambahkan bahwa JRI membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.

Bila bawahan atau pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Krisler Bornadi Omposunggu dan Icut Ranga Bawono, 2006).

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemda

Teori persepsi menjelaskan, untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan persepsi mengenai informasi yang dimiliki pada kedua tingkatan manajer yaitu manajer puncak dan manajer tingkat menengah ke bawah serta memaksimalkan partisipasi agar menjadi efektif, maka manajer tingkat menengah ke bawah dalam organisasi tersebut harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dalam proses penyusunan anggaran dengan mengungkapkan informasi yang dimiliki terkait pekerjaan sebagai kontribusi dalam penetapan jumlah anggaran. Sehingga mereka ikut merasa bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran

tersebut dan meningkatkan kinerja. (Hehanusa, 2010).

Dengan adanya keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran ini maka aparat tersebut akan meminimalisasi terjadinya perbedaan persepsi serta memiliki rasa tanggung jawab dan konsekuensi moral untuk mengimplementasikan anggaran yang ia ikut terlibat di dalamnya. Untuk itu, mereka akan mengerahkan segala upaya dalam pencapaiannya sehingga meningkatkan kinerja mereka.

H1: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Komitmen Organisasi

Hehanusa (2010) menjelaskan tentang teori tujuan dimana tujuan individu akan menentukan pilihan tindakan yang akan dilakukan. Setiap individu menginginkan pencapaian atas tujuan-tujuan mereka. Tujuan individu akan menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukannya. Semakin tinggi kemauan seorang individu dalam mencapai tujuannya akan mendorong individu tersebut untuk melakukan suatu usaha yang semakin keras.

Manajer yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan lebih memahami tujuan anggaran yang mencerminkan tujuan organisasi. Dengan manajer memahami tujuan-tujuan tersebut, akan mendorong manajer berupaya dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mencapai tujuannya. Hal ini memberi dampak manajer akan

memiliki komitmen (*affective*) organisasi yang lebih tinggi.

H2a: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Salah satu komponen komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Meyer (2000) yaitu *Continuance Commitment*, yang muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji, kenaikan pangkat, ataupun keuntungan-keuntungan lain (*need to*).

Sesuai dengan Teori Kebutuhan McClelland (McClelland's theory of needs) bahwa adanya kebutuhan seseorang tentang kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan lainnya dapat menumbuhkan komitmen terhadap organisasi, yang membuatnya semakin meningkatkan kinerjanya.

Lebih lanjut, Chong dan Chong (2002) menjelaskan bahwa pada konteks pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan dari Teori Kebutuhan dan hasil dari penelitian-penelitian di atas, didapatkan pemikiran bahwa kebutuhan seseorang tentang kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan lainnya, dapat menumbuhkan komitmen terhadap

organisasi dimana ia merasa dirinya adalah bagian dari organisasi tersebut. Maka agar tercapai kinerja organisasi yang diharapkan, ia harus semakin meningkatkan kinerja dirinya.

H2b: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

H2: Komitmen organisasi dapat menjadi variabel intervening dalam hubungan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Job Relevant Information

Shield dan Shield (1998) dalam Sumarno (2005) dalam penelitiannya memaparkan bahwa terdapat 3 (tiga) teori landasan partisipatif anggaran salah satunya Teori Ekonomi yang berasumsi bahwa anggaran digunakan sebagai dasar yang sehat untuk memilih dan berbagi informasi di antara anggota yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.

Beberapa penelitian menganggap bahwa bawahan yang diperbolehkan berpartisipasi dalam proses penetapan anggaran, berhasil dalam mengungkapkan informasi privat (Merchant, 1981; Chow *et al.*, 1988; Murray, 1990, Magner *et al.*, 1996). Hasil informasi tersebut berguna untuk merencanakan anggaran yang lebih realistis dan akurat, terutama informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. *Job relevant information* (JRI) adalah informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas atau *decision facilitating* (Kren, 1992).

Berlandaskan dari teori dan penelitian di atas dapat dihubungkan bahwa dengan adanya keterlibatan bawahan dalam proses partisipasi penganggaran membuat bawahan mampu mengungkapkan informasi privat yang dimilikinya, sehingga atasan akan mendapat pemahaman tentang informasi yang relevan dengan tugas, yang dapat dijadikan bahan-bahan pertimbangan dalam proses penganggaran beserta alternatif-alternatif pilihannya.

H3a: Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap *job-relevant information*.

Pengaruh *Job Relevant Information* terhadap Kinerja Aparat pemerintah Daerah

Shield dan Shield (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa teori sosiologi berasumsi bahwa lingkungan eksternal organisasi menjadi semakin tidak pasti, yang ditunjukkan dengan meningkatnya perbedaan jumlah dan jenis unit dalam organisasi.

Hal ini membawa konsekuensi perlunya peningkatan informasi yang relevan dengan tugas untuk mengoordinasikan aktivitas unit dan menyatukan semua aktivitas dalam organisasi. Karena melalui JRI, bawahan mengungkapkan informasi yang mereka ketahui kepada atasannya sebagai proses koordinasi dalam tiap-tiap unit aktivitas dalam organisasi sehingga akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan kinerja.

H3b: *Job relevant information* berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

H3: *Job-Relevant Information* dapat menjadi variabel intervening dalam

hubungan partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Pejabat Eselon III dan IV di SKPD Kabupaten Bengkalis yang turut serta dalam proses penyusunan anggaran. Adapun teknik pengambilan sampel, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan teknik ini karena pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0.

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel kinerja aparat pemerintah daerah diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Mohammad Mahsun (2006). Variabel partisipasi anggaran menggunakan instrumen yang diadaptasi dari Milani (1975). Variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan instrumen yang dibuat oleh Mowday (1979). Sedangkan variabel tekanan eksternal diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kren (1992).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Partisipasi Anggaran	6-30	18	14 - 30	24
Komitmen Organisasi	9-45	27	23 - 45	36,4
JobRelevant Information	6-30	18	20 - 30	24,9
Kinerja Aparat Pemda	7-35	21	24 - 35	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data tersebut dapat ditunjukkan bahwa pada variabel Partisipasi Anggaran, jawaban yang diberikan responden mempunyai kisaran bobot jawaban antara 14 sampai 30 dengan rata-rata sebesar 27. Untuk variabel Komitmen Organisasi, jawaban yang diberikan responden mempunyai kisaran bobot jawaban antara 23 sampai 45 dengan rata-rata teoritis sebesar 36,40. Variabel *job-relevant information* memiliki kisaran 20 sampai 30 dengan rata-rata 24,96. Sedangkan variabel Kinerja Aparat Pemda memiliki bobot jawaban kisaran 24 sampai 35 dengan rata-rata 30.

Gambaran Umum Responden

Kuesioner disebar pada 33 SKPD yang berada Di Pemerintahan Kota Pekanbaru. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 90 responden. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 86 kuesioner kembali atau 75,56% dari 90 kuesioner yang telah disebar. Dari kuesioner yang dikembalikan, seluruhnya terisi lengkap dan dapat digunakan.

Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas konvergen didapatkan bahwa nilai AVE dari item pernyataan untuk semua variabel $>0,50$. Dan pada uji validitas diskriminan seluruh variabel memiliki hasil akar AVE lebih besar dari korelasi dengan konstruk lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi, *job-relevant information* dan kinerja aparat pemerintah daerah adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Composite Reliability

VARIABEL	Reliability	Ket
Job-relevant Information	0.766	Reliabel
Kinerja Aparat Pemda	0.834	Reliabel
Komitmen Organisasi	0.868	Reliabel
Partisipasi Anggaran	0.866	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Didapatkan hasil bahwa besarnya *Composite reliability* pada seluruh variabel baik variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi, *job-relevant information* dan kinerja aparat pemerintah daerah lebih besar dari 0,70 sehingga dikatakan reliabel.

Tabel 3

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics
Job-relevant Inf -> Kinerja	0.336	0.132	2.468
Komitmen -> Kinerja	0.199	0.180	1.105
Partisipasi -> Job Relevant Information	0.370	0.113	2.513
Partisipasi -> Kinerja	0.250	0.181	1.379
Partisipasi -> Komitmen	0.711	0.063	11.236

Sumber: Pengolahan Data Penulis

Tabel 4
Uji Sobel (Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemda)

Variabel Intervening	VI-> M (A)	M-> DV (B)	SE A	SE B	T Statistik
Komitmen Organisasi	0.711	0.199	0.063	0.180	1.103
Job-relevant information	0.370	0.336	0.113	0.132	2.011

Sumber: Pengolahan Data Penulis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,96 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji analisis jalur, menghasilkan nilai $t_{statistik}$ sebesar 1,379 dengan nilai signifikansi sebesar 0,250. Dengan demikian, $t_{statistik}$ 1,379 > t_{tabel} 1,96 dengan signifikansi 0,250 > 0,05. Jadi dapat dikatakan H1 ditolak.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,96 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji analisis jalur dihasilkan :

- a. Hasil Pengujian H2a : diperoleh $t_{statistik}$ 11,236 > t_{tabel} 1,96 dengan

signifikansi 0,711 > 0,05. Jadi dapat dikatakan H2a diterima.

- b. Hasil Pengujian H2b : diperoleh $t_{statistik}$ 1,105 < t_{tabel} 1,96 dengan signifikansi 0,199 > 0,05. Jadi dapat dikatakan H2b ditolak.
c. Hasil Pengujian Uji Sobel : $t_{statistik}$ 1,103 < t_{tabel} 1,96 tidak signifikan. Jadi dapat dikatakan H2 ditolak.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,96 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji analisis jalur dihasilkan :

- a. Hasil Pengujian H3a : diperoleh $t_{statistik}$ 2,513 > t_{tabel} 1,96 dengan signifikansi 0,370 > 0,05. Jadi dapat dikatakan H3a diterima.
b. Hasil Pengujian H3b : diperoleh $t_{statistik}$ 2,468 < t_{tabel} 1,96 dengan signifikansi 0,336 > 0,05. Jadi dapat dikatakan H2b diterima.
c. Hasil Pengujian Uji Sobel : $t_{statistik}$ 2,011 < t_{tabel} 1,96 signifikan. Jadi dapat dikatakan H3 diterima.

Tabel 5
R Square

	R Square
Job-relevant Inf.	0.084
Kinerja Aparat Pemda	0.409
Komitmen Organisasi	0.505
Partisipasi Anggaran	

Nilai *R-square* memberikan hasil bahwa model yang mempengaruhi *Job-Relevant Information* memberikan nilai *R square* sebesar 0.084 dapat diinterpretasikan bahwa variabel ini dipengaruhi oleh variabel partisipasi anggaran sebesar 8,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lainnya. Kemudian dapat dilihat dari

tabel variabel komitmen organisasi memberikan nilai *R square* sebesar 0.505 yang berarti variabel komitmen organisasi dipengaruhi oleh variabel partisipasi anggaran sebesar 50,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel konstruk lainnya.

Sedangkan nilai *R square* untuk variabel kinerja aparat pemerintah daerah diperoleh sebesar 0,409. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 40,90% dari variabel kinerja aparat pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan *job-relevant information*. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat terjadi karena partisipasi dalam proses penganggaran acapkali hanya dianggap sebagai formalitas dimana akhirnya yang menjadi usulan adalah hasil birokrasi pimpinan. Jadi, hal ini menyebabkan partisipasi penganggaran tidak mempengaruhi kinerja pada aparat pemerintahan daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Komit-

men Organisasi tidak berperan sebagai variabel intervening dalam pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat disebabkan karena aparat pemerintahan tidak memiliki komitmen yang cukup dalam organisasinya, dikarenakan dalam organisasi pemerintahan sering terjadi mutasi dari organisasi ke organisasi lain. Sehingga Komitmen Organisasi tidak dapat mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dan tidak dapat menjadi variabel pemediasi antara keduanya.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *Job-Relevant Information* berperan sebagai variabel intervening dalam pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini sejalan dengan penelitian Kren (1992) bahwa Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, namun *Job-Relevant Information* yang berperan menjadi variabel pemediasi dalam hubungan antara keduanya.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah penelitian ini menerapkan metode survei yang dilaksanakan dengan pernyataan tertulis. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dari responden dengan keadaan sesungguhnya. Selain itu, objek penelitian hanya terdistribusi pada sektor pemerintahan Kabupaten Bengkalis sehingga mempengaruhi kemampuan

penelitian ini untuk digeneralisasikan pada sektor dan wilayah yang lebih luas.

Saran

Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap transparansi pelaporan keuangan sehingga efektif bagi organisasi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. dan Govindarajan, V. 2005. *Management Control System*, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Brownell, P. dan McInnes. 1983. *Budgetary Participation, Motivation and Managerial Performance. Working Paper Alfred P. Sloan School of Management. WP 1389-83*, January 1983. Hlm. 1-39.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*: Edisi 3. Semarang: Badam penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafridebri. 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Sasaran Tujuan dan Job-Relevant Information sebagai Variabel Intervening (studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di Pekanbaru)*. Skripsi, UNP : Padang.
- Haryanti, I. dan Othman, R. 2012. *Budgetary Participation: How It Affects Performance And Commitment. Accountancy Business And The Public Interest*. Hlm. 53-73.
- Hehanusa, Maria. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat: Integrasi Variabel Intervening Dan Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Ambon Dan Pemerintah Kota Semarang*. Tesis. UNDIP : Semarang.
- Kren, L. 1992. *Budgetary Participation and Managerial Performance: The Impact of Information and Environmental Volatility. The Accounting Review*, 511-526.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Omposunggu, K. B. dan Bawono, I. R. 2006. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information Terhadap Informasi Asimetris*. Prosiding, Simposium Nasional Akuntansi IX. 23-26 Agustus, Page 1-27.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2007. *Organizational Behaviour*, Edisi 9, Jilid 1, PT. Prenhallindo, Jakarta.

- Setiadi, Hidayat. 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Organisasi dan Budget Emphasis Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali)*. Skripsi : UNDIP, Tidak Dipublikasikan.
- Sumarno, J. 2005. *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, 15-16 September 2005. Hal. 586- 616.
- Supriyono, R. A., dan Syakhroza, A. 2004. *Peran Asimetri Informasi dan Peresponan Keinginan Sosial sebagai Variabel Moderating Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia*. SNA VI, Surabaya.
- Syafruddin, M. 2006. *Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan SIKD Untuk Kontrol Keputusan dan Manajemen Keputusan, dan Perilaku Manajerial : Studi Pada Organisasi Pemerintahan Daerah*. SNA 9, Padang.
- www.bengkaliskab.go.id
- www.bpk.go.id
- Yanti, Rindu S. 2013. *Pengaruh Good Governance, Budaya Organisasi, dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Aparat Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)*. Skripsi : UIR, Tidak Dipublikasikan.
- Yusfaningrum, Kusnasriyanti dan Imam Ghozali. 2005. *Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) sebagai Variabel Intervening (Penelitian terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia)*, SNA VIII, Solo.